



Fatimah BEM UI: Nyawa Teman Saya Lebih Berharga

Pemerintah harus merogoh dompet negara hingga Rp650,31 triliun hanya untuk membayar bunga utang pada 2027. Angka itu naik Rp68,07 triliun atau sekitar 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026 yang sebesar Rp582,24 triliun. Bahkan, nilai itu menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu tekanan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memang menargetkan defisit lebih rendah tahun depan. Defisit RAPBN dipatok Rp671,16 triliun atau 2,40 persen PDB, turun dari outlook 2026 sebesar Rp734,32 triliun atau 2,85 persen PDB. Namun, kebutuhan pembiayaan belum menyusut sepenuhnya. Pemerintah masih merancang pembiayaan utang Rp876,27 triliun, terdiri atas SBN neto Rp779,94 triliun dan pinjaman neto Rp96,33 triliun. (tangapan layar YouTube Setpres)

INDONESIA 2027: ROGOH RP650 T UNTUK BUNGA UTANG

2027*
Rp 650,31 T

2026*
Rp 599,44 T

2025
Rp 552,9 T

2024
Rp 499,0 T

*RAPBN

PEMBAYARAN
**BUNGA
UTANG RI**

2023
Rp 439,9 T

PEMBERI UTANG TERBESAR RI

ULN Indonesia
Kuartal II 2026

Total ULN
US\$453,4 miliar

Tumbuh
4,4% (yoy)

ULN Berdasarkan
Sektor

Pemerintah:
US\$216,3 miliar

Swasta:
US\$194,6 miliar

Pemerintah harus merogoh dompet negara hingga Rp650,31 triliun hanya untuk membayar bunga utang pada 2027. Angka itu naik Rp68,07 triliun atau sekitar 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026 yang sebesar Rp582,24 triliun. Bahkan, nilai itu menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu tekanan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memang menargetkan defisit lebih rendah tahun depan. Defisit RAPBN dipatok Rp671,16 triliun atau 2,40 persen PDB, turun dari outlook 2026 sebesar Rp734,32 triliun atau 2,85 persen PDB. Namun, kebutuhan pembiayaan belum menyusut sepenuhnya. Pemerintah masih merancang pembiayaan utang Rp876,27 triliun, terdiri atas SBN neto Rp779,94 triliun dan pinjaman neto Rp96,33 triliun. SELENGKAPNYA DI HAL 11....

PEMERINTAH KLAIM MAYORITAS OJOL SETUJU JADI UMKM, SERIKAT PEKERJA MENOLAK

Pemerintah tetap mendorong pengemudi ojek online (ojol) masuk dalam kategori usaha mikro meski mendapat penolakan dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menyerap aspirasi dari berbagai komunitas dan asosiasi pengemudi.

Maman mengklaim mayoritas komunitas ojol yang ditemui pemerintah justru menyetujui, bahkan mendorong agar status mereka diarahkan menjadi pelaku usaha mikro.

"Semua setuju dan bahkan mendorong untuk ini dijadikan UMKM statusnya, usaha mikro," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut Maman, pemerintah telah menyerap aspirasi dari hampir 20 komunitas dan asosiasi ojol. Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan suara satu kelompok.

Pernyataan tersebut disampaikan Maman merespons sikap SPAI yang menolak pengemudi ojol, taksi online, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM.

Maman mengatakan pemerintah



Sejumlah pengemudi ojek online membawa penumpang di Depok, Jawa Barat. (ilustrasi/ist)

tetap menghormati kelompok yang menginginkan status sebagai pekerja.

"Beliau menginginkan menjadi pekerja. Ya saya pikir itu kita hargai. Aspirasi kan," katanya.

Namun, pemerintah mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk aspirasi mayoritas komunitas pengemudi, aplikator, serta keberlangsungan

ekosistem transportasi daring.

"Tapi kan tetap kita harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Dari sebagian besar komunitas atau ojol. Dan juga aplikator. Serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan ekosistem ini," ujar Maman.

Maman mengatakan hasil penyerapan aspirasi dan pertimbangan pemerintah menunjukkan bahwa status usaha mikro dinilai lebih positif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online.

"Nah berdasarkan aspirasi yang kita serap, dan juga pertimbangan kita. Kita melihat dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini tetap sehat dan tumbuh ke depan dengan prinsip berkeadilan. Kita melihat dengan treatment penerapan status ojol ini menjadi usaha mikro itu lebih positif," tutur Maman.

Pemerintah juga menepis kekhawatiran bahwa perubahan status tersebut akan membuat pengemudi kehilangan fasilitas yang selama ini diterima, termasuk perlindungan terkait kecelakaan. Maman memastikan fasilitas tersebut tetap diberikan.

"Sampai sekarang tetap dapat, nggak ada yang berkurang terkait fasilitas itu. Nggak ada yang berubah," tegasnya.

Bagi pemerintah, perubahan status tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengubah hubungan pengemudi dengan aplikator. Skema UMKM diarahkan agar pengemudi dapat memperoleh akses lebih luas terhadap program pemberdayaan dan pembiayaan usaha.

Dalam rapat bersama DPR, Maman juga mengatakan pemerintah akan kembali bertemu dengan komunitas dan asosiasi ojol serta aplikator untuk menyerap aspirasi sekaligus memfinalisasi aturan.

"Dan InsyaAllah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua," ujar Maman.

Ia mengatakan pemerintah ingin pengemudi ojol tidak hanya mengandalkan pendapatan dari tarif perjalanan. (tin,ist,kcm/dya)

Dasco: Orang Diatur Kemenhub, Makanan Komdigi

DPR dan pemerintah telah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai transportasi online. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan regulasi tersebut tidak hanya mengatur layanan angkutan penumpang, tetapi juga mencakup pengantaran barang dan makanan. Menurut Dasco, pembagian kewenangan pengaturan tarif akan dilakukan berdasarkan jenis layanan.

Tarif transportasi online untuk angkutan orang akan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara tarif pengantaran barang dan makanan akan diatur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi. Karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2026).

"Di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi, dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Dan pelaku transportasi online ini akan

diatur dan dinaungi oleh Kementerian UMKM," lanjutnya.

Setelah finalisasi, kementerian terkait akan melakukan harmonisasi dengan para pelaku transportasi online. Proses tersebut mencakup organisasi-pengemudi dan perusahaan aplikator.

"Dan setelah finalisasi hari ini, kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online seperti organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan Perpresnya," kata Dasco.

Dengan demikian, perdebatan status pengemudi menjadi bagian dari proses finalisasi regulasi transportasi online. Pemerintah menginginkan pengemudi masuk dalam ekosistem UMKM, sementara SPAI tetap menuntut pengakuan sebagai pekerja dengan hak-hak ketenagakerjaan.

Jika target pemerintah terpenuhi, Perpres tersebut akan terbit dalam hitungan pekan, bersamaan dengan penyelesaian perdebatan mengenai posisi pengemudi dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Di tengah polemik status tersebut,

pemerintah terus menyelesaikan Perpres yang mengatur transportasi online. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menargetkan aturan tersebut terbit akhir Agustus atau paling lambat awal September.

"Kami targetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur jasa transportasi online," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Prasetyo mengatakan pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan dalam penyusunan regulasi tersebut. Setelah finalisasi, pemerintah akan melakukan harmonisasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan aplikator.

"Alhamdulillah kita sudah mencapai kesepakatan berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojol," ujarnya.

Kemensetneg, kata Prasetyo, akan memimpin proses harmonisasi sebelum Perpres diterbitkan. (tin,ist,kum/dya)

DPR-PEMERINTAH SEPAKAT GURU PARUH WAKTU JADI PEGAWAI PENUH WAKTU PUSAT

Pemerintah dan DPR akhirnya memfinalisasi penataan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mulai 2027, guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu akan diberi kesempatan menjadi PPPK penuh waktu. Tak berhenti di perubahan status. Pemerintah juga menyepakati pengalihan status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat.

DATA ASN GURU (PER 31 DESEMBER 2025)

Sumber: BKN

Total
2.299 JUTA
ASN GURU

Sebaran Instansi:

92% | di Instansi Daerah

8% | di Instansi Pusat

Komposisi:

1,139 Juta | PNS

989 Ribu | PPPK

170 Ribu | PPPK Paruh Waktu



Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Agama Nasarudin Umar, Wamendagri Bima Arya, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil rapat koordinasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).ist

pemerintah dan DPR. Pertama, PPPK guru paruh waktu diberi kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Kedua, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diperkirakan dibuka pada awal 2027.

Ketiga, status kepegawaian guru PPPK akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

"Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk, pertama, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberikan kesempatan menjadi PNS," ujar Prasetyo.

Ia kemudian menegaskan perubahan kedudukan kepegawaian tersebut.

"Tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat," kata dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan jumlah guru yang

saat ini berstatus PPPK mencapai 955.245 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang merupakan guru PPPK paruh waktu.

"Pada saat ini, PPPK itu jumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang," kata Rini.

Dengan demikian, lebih dari 230 ribu guru menjadi kelompok yang akan terdampak langsung oleh kebijakan pengalihan status tersebut.

Mulai 2027

Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan itu mencakup guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta program pendidikan baru pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi

PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.

Selain itu, guru PPPK akan diberi akses mengikuti seleksi PNS.

"Kemudian juga akan diberikan kesempatan PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027," lanjutnya.

Rini mengatakan pemerintah juga akan membuka kebutuhan guru berdasarkan proyeksi kebutuhan nasional 2026.

"Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda," kata Rini.

Pengalihan status menjadi pegawai pemerintah pusat menjadi salah satu bagian penting dari keputusan pemerintah dan DPR.

Kebijakan ini berpotensi mengubah pola pengelolaan guru PPPK yang selama ini berkaitan erat dengan pemerintah daerah. Sebelumnya, persoalan pembiayaan guru PPPK menjadi salah satu isu karena kapasitas fiskal setiap daerah berbeda. (tin,rls,dtc/dya)

“

Akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027."

RINI WIDYANTINI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Bawa 8 Tuntutan ke Jalan

BEM UI: NEGARA MAKIN KUAT, RAKYAT KIAN MELEMAH

Sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) turun ke jalan dengan membawa kritik terhadap arah kekuasaan dan kondisi masyarakat. Melalui aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan.

Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra mengatakan tuntutan itu memiliki satu benang merah yaitu negara dinilai semakin kuat, sementara rakyat justru kian melemah.

"Dari 1 sampai 8 sebetulnya benang merahnya itu, dan itu yang ingin kita raise ke pemerintah bahwa mereka harus bisa mematuhi mekanisme yang ada," ujar Fathimah di lokasi aksi, Selasa (18/8/2026).

Menurut Fathimah, persoalan tersebut berkaitan dengan melemahnya mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Ia menyoroti kondisi checks and balances antara eksekutif dan legislatif yang dinilai tidak berjalan optimal karena dominasi koalisi di parlemen.

"Sementara menjadi sulit ketika semuanya menjadi koalisi, dan akhirnya DPR menjadi juru bicara partai, juru bicara pemerintah, akhirnya balance itu rusak," kata Fathimah.

Ia menilai kerusakan keseimbangan kekuasaan tersebut turut menjadi pemicu munculnya protes dan kemarahan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mempersoalkan demonstrasi, tetapi mengevaluasi mekanisme pengawasan kekuasaan.



Foto udara saat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, demonstrasi Selasa (18/8/2026). (Ist)

"Kalau seandainya keseimbangan tidak rusak, maka dampaknya juga tidak akan keparah itu. Jadi, kita rasa itu sih yang perlu direfleksikan lagi dari pemerintah dan perlu diubah segera," tutur Fathimah.

Sementara, Ketua BEM UI Yatalatof Imawan mengatakan tuntutan tersebut

merupakan bentuk kritik terhadap persoalan struktural yang dianggap belum terselesaikan. Ia bahkan meminta maaf kepada warga Jakarta jika aksi menimbulkan kemacetan.

"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya

DELAPAN TUNTUTAN BEM UI

- **Pertama**, menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- **Kedua**, menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- **Ketiga**, mahasiswa menuntut reforma agraria sejati.
- **Keempat**, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- **Kelima**, BEM UI meminta evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- **Keenam**, mereka menuntut penghentian pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta pengembalian otonomi daerah.
- **Ketujuh**, BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- **Kedelapan**, mahasiswa menuntut penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).



beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," kata Yatalatof.

Fathimah menjelaskan delapan tuntutan itu tidak semata-mata lahir dari kajian internal mahasiswa. BEM UI, kata dia, menyusun kajian berdasarkan kondisi sosial yang dirasakan masyarakat.

"Dari BEM UI sendiri membuat kajian, dan kajian kita itu selalu majority based on apa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang both keduanya, dari kajian dan dari aspirasi masyarakat, karena kajian kita sendiri berlandaskan dari sana," ujar Fathimah.

Aksi mahasiswa sempat diwarnai ketegangan ketika massa BEM UI berupaya bergerak menuju Bundaran HI. Aparat menghadang massa di sekitar kawasan Sudirman hingga Tosari.

Polda Metro Jaya sebelumnya menjelaskan alasan pelarangan aksi di Bundaran HI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman sebagai center of gravity Jakarta. (wid,ist,kum/dya)

Polisi Amankan 21 Orang, 2 Ditangkap Bawa Pisau dan Golok

DEMONSTRASI Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), diwarnai penangkapan dua kelompok kejadian. Sebanyak 21 orang ditahan sebelum aksi, sementara dua orang ditangkap karena kedatangan membawa senjata tajam.

Keduanya diamankan aparat ketika hendak menuju titik aksi mahasiswa. Polisi menyita satu bilah pisau dan satu bilah golok dari dua orang berbeda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pisau ditemukan dari seorang mahasiswa berinisial AM. Sementara golok ditemukan dari

seorang sopir ambulans.

"Dalam proses pelaksanaan aksi, ada temuan oleh Satgas Gakkum, ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalam, yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh sopir ambulans," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Polisi belum menyimpulkan tujuan kedua orang tersebut membawa senjata tajam. Budi mengatakan keduanya masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui maksud membawa senjata tersebut ke sekitar lokasi demonstrasi.

"Saat sekarang untuk orang-orang tersebut masih didalam apakah niat membawa ini untuk

apa, ini masih kami dalam," kata Budi.

Temuan pisau dan golok itu terjadi ketika aparat melakukan pengamanan terhadap aksi BEM UI yang awalnya direncanakan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Polisi sebelumnya membatasi lokasi penyampaian aspirasi hingga kawasan Dukuh Atas, tepatnya di depan UOB Plaza.

Polda Metro Jaya menyebut pembatasan lokasi mempertimbangkan tingginya aktivitas masyarakat di kawasan Sudirman-Thamrin. Pada hari yang sama, polisi menyiapkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan berbagai kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. (wid,tmp,rls/dya)



50 Bus Hangus dalam Kebakaran PO Sinar Jaya

Kebakaran besar melanda pangkalan PO Sinar Jaya di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/8/2026) dini hari. Sebanyak 50 bus yang sudah tidak beroperasi hangus terbakar di area seluas sekitar 800 meter persegi. Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi mengerahkan sembilan armada untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara nilai kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan kepolisian.(dok.ist)

HAKIM TOLAK PERMOHONAN TAHANAN RUMAH YAQUT

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Hakim menilai fasilitas dan sarana kesehatan bagi Yaqut selama berada di Rutan KPK telah tersedia.

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan permohonan pengalihan penahanan Yaqut belum dapat dikabulkan. Hakim juga meminta pihak rutan memastikan kebutuhan kesehatan para tahanan tetap terpenuhi.

"Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi Rutan, seperti itu, Penuntut Umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana, bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan. Saya rasa berkenaan dengan hal tersebut kami belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena berkaitan dengan kebutuhannya hanya dua hal tersebut," kata Ni Kadek dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Hakim meminta Yaqut dan penasihat hukumnya berkonsultasi dengan dokter KPK apabila mengalami kondisi medis darurat. Jika diperlukan perawatan di rumah sakit,



Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas melambatkan tangannya saat akan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/8/2026). ANTARA

dokter KPK akan menyampaikan kondisi tersebut kepada majelis hakim.

"Tapi sekiranya saudara mengalami darurat medis yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di KPK. Nanti dokter KPK akan menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap ataukah hanya untuk sekadar berobat luar," ujar Ni Kadek.

Dengan putusan tersebut, Yaqut tetap menjalani penahanan di Rutan KPK selama proses persidangan perkara dugaan korupsi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian tambahan kuota haji 2023–2024 berlangsung.

Persoalkan Dakwaan KPK

Seusai persidangan, Yaqut menilai dakwaan jaksa KPK tidak cermat dan lengkap. Ia menilai jaksa

mencampuradukkan kebijakan menteri dengan kebijakan teknis yang semestinya menjadi kewenangan direktorat jenderal.

"Kebijakan menteri itu dicampuradukkan dengan kebijakan teknis yang seharusnya itu menjadi ranah direktorat jenderal. Jadi itu diarahkan menjadi kebijakan menjadi kesalahan Menteri, begitu ya," kata Yaqut.

Yaqut juga menilai perkara yang menjeratnya semestinya berkaitan dengan ranah kebijakan pemerintahan dan diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Tipikor.

"Tadi yang disampaikan dan pendapat kami memang begitu. Seharusnya ini, locus-nya di soal kebijakan. Soal kebijakannya yang harus dipersoalkan. Manakala ada yang melakukan, korupsi, tindak pidana korupsi ya, ya itu yang diproses," ujarnya. Meski membantah dakwaan tersebut, Yaqut mengatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Prinsipnya, kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Dalam nota perlawanan yang dibacakan penasihat hukumnya, Mellisa, Yaqut juga membantah tuduhan terkait pembagian tambahan kuota haji. Ia mengklaim pembagian kuota tambahan sebanyak 20 ribu jemaah dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler dilakukan demi keselamatan jemaah.(gus,ist,ito/dya)

200 Lebih Jabatan ASN Pemkab Malang Kosong



Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera mengusulkan nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengisi jabatan yang saat ini masih kosong. Sedikitnya terdapat 200 lebih posisi yang belum terisi. Termasuk 4 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau jabatan strategis di lingkungan Pemkab Malang.

"Ada kurang lebih 200 sekian kekosongan ya, sampai yang ujung tombak di kecamatan-kecamatan. Jumlah itu termasuk empat JPTP yang

sekarang kosong," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut tersebar mulai dari level pimpinan perangkat daerah hingga jabatan di tingkat kecamatan. "Artinya, persoalan kekosongan tidak hanya terjadi pada posisi struktural di tingkat atas, tetapi juga menyentuh jabatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan," kata Nurman.

Dari ratusan jabatan yang kosong, lanjut Nurman, empat di antaranya merupakan JPTP. Keempat posisi tersebut, yakni Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, serta Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian,

Keuangan dan Pembangunan.

Untuk sementara, sejumlah posisi saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Posisi Kepala Inspektorat, misalnya, dijalankan oleh Hendrawan Arrie Mahardhika yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum.

Sementara itu, jabatan Kepala Dinas PUSDA diisi Plt Yudi Hindharto yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Jabatan Kepala Dispora dijalankan oleh Plt Eko Margianto yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Sedangkan untuk posisi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, hingga kini masih kosong.

"Untuk Inspektorat Plt atas nama Hendrawan Arrie Mahardhika (Kabag Hukum); Dinas PUSDA Plt atas nama Yudi Hindharto (Kepala Disnaker); Dispora Plt atas nama Eko Margianto (Kepala Dishub); dan Staf Ahli kosong," jelas Nurman.

Lebih lanjut, dikatakannya, proses pengisian ratusan jabatan tersebut kini telah memasuki tahap finalisasi. BKPSDM Kabupaten Malang sedang menyusun draf final nama-nama ASN yang akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi dari BKN.

Jika proses finalisasi berjalan sesuai rencana, pengajuan nama-nama tersebut ditargetkan dilakukan paling

cepat pada pekan depan. "Insyaallah sebentar lagi, ini sedang kami proses. Belum kami ajukan, tetapi segera kami ajukan. Cepat itu kalau sudah di BKN. Dalam minggu depan kami ajukan," terang Nurman.

Meski demikian, Nurman belum dapat memastikan kapan rekomendasi dari BKN akan diterbitkan. Setelah usulan dikirimkan, waktu keluarnya rekomendasi sepenuhnya mengikuti proses yang berjalan di BKN.

Karena itu, Pemkab Malang masih menunggu tahapan tersebut sebelum proses pengisian jabatan dapat dilanjutkan. Nurman berharap seluruh proses berjalan cepat dan lancar serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Nurman menegaskan dirinya memiliki target untuk menuntaskan persoalan kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Malang sebelum memasuki masa purna tugas pada tahun depan.

Ia berharap seluruh posisi yang saat ini kosong dapat segera terisi sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Malang dapat berjalan secara optimal. "Komitmen saya sebelum purna tahun depan, seluruh jabatan yang kosong ini bisa terisi," tegas Nurman. (Santi/Dya)

DPRD Soroti Kinerja BUMD Tugu Artha dan Tunas

MALANG - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang menjadi sorotan DPRD setempat. Legislatif mendorong adanya ekspansi kebijakan pada BPR Tugu Artha serta penataan organisasi di Tugu Aneka Usaha (Tunas). Diharapkan, kedua BUMD tersebut dapat lebih optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Donny Victorius, mengatakan keberadaan BUMD semestinya tidak hanya berorientasi pada pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD juga harus mampu menjadi stimulator bagi pertumbuhan sektor perekonomian di Kota Malang.

"Kami memandang BUMD, khususnya Tugu Aneka Usaha (Tunas) dan BPR Tugu Artha, harus berperan dalam dua hal. Pertama membantu meningkatkan PAD dan kedua sebagai stimulator dalam menaikkan sektor perekonomian di Kota Malang," ujar Donny, dalam paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Kota Malang

terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (18/8/2026).

Kondisi kedua BUMD tersebut saat ini dinilai masih jauh dari harapan sehingga membutuhkan ekspansi kebijakan agar potensi usaha yang dimiliki dapat dimaksimalkan.

Donny mendorong agar BUMD tersebut mendapat perluasan kebijakan. Salah satunya dengan mulai mengelola pembayaran kepegawaian seperti yang telah dilakukan oleh BPR di Sidoarjo dan Jombang.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dimulai dari pengelolaan dana pembayaran honor bagi Ketua RT, Ketua RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), hingga guru ngaji. "Langkah awal bisa dimulai dengan BPR Tugu Artha mengelola dana pembayaran honor Ketua RT, Ketua RW, Satlinmas dan Guru Ngaji," katanya.

Donny menilai ekspansi tersebut penting untuk menggerakkan sektor usaha BPR Tugu Artha. Dengan

berkembangnya aktivitas usaha BPR, diharapkan keberadaan BUMD tersebut nantinya juga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Terlebih, BPR Tugu Artha diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif akses permodalan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan perbankan konvensional.

Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI juga menyoroti pengelolaan Tugu Aneka Usaha (Tunas). Donny menilai BUMD tersebut membutuhkan penataan organisasi yang lebih baik agar kinerjanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.

"Untuk Tunas, diperlukan



Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Selasa (18/8/2026). (Santi/Lentera)

penataan organisasi yang baik, sehingga ke depan kinerjanya bisa seiring dengan tujuan didirikannya BUMD ini," katanya.

Menanggapi sorotan DPRD tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyiapkan proses pengisian jabatan direksi di Tugu Artha dan Tunas. (Santi/Dya)

Ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali mengguncang pasar keuangan global. Ancaman Presiden Donald Trump terhadap Oman, kebuntuan negosiasi Washington-Teheran, serta ketidakpastian aktivitas pelayaran di Selat Hormuz membuat investor kembali mengantisipasi risiko inflasi dan gangguan pasokan energi.

Harga minyak Brent bahkan mendekati US\$91 per barel pada perdagangan awal pekan. Pada Senin (17/8/2026), Brent ditutup naik US\$2,35 atau 2,65 persen menjadi US\$90,87 per barel. Harga West Texas Intermediate (WTI) juga naik US\$2,10 atau 2,55 persen menjadi US\$84,50 per barel.

Kenaikan harga minyak terjadi setelah prospek perundingan damai AS-Iran kembali memburuk. Iran menyatakan Selat Hormuz tetap ditutup sampai Washington memenuhi sejumlah ketentuan dalam kesepakatan sementara yang dibuat pada Juni.

Dikutip Selasa (18/8/2026) Trump justru menyatakan kesepakatan tersebut telah berakhir. Reuters melaporkan Trump juga mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Oman apabila negara tersebut dianggap menghambat upaya membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Kebuntuan diplomasi menjadi salah satu pemicu utama kegelisahan pasar.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan Iran seharusnya menyerah untuk mengakhiri konflik.

"Mereka seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah."

Pernyataan itu disampaikan ketika tenggat 60 hari yang ditetapkan dalam nota kesepahaman AS-Iran berakhir pada Senin (17/8/2026).

Kesepakatan tersebut sebelumnya dirancang untuk menghentikan operasi militer dan membuka jalan menuju perundingan yang lebih luas. Salah satu isu utama yang hendak dibahas adalah program nuklir Iran.

Namun, kesepakatan itu tidak bertahan lama. Trump menyatakan perjanjian tersebut berakhir pada 7 Juli. Iran kemudian menyatakan kesepakatan itu ditangguhkan.

Situasi semakin rumit karena Iran menyatakan akan beralih ke posisi militer yang lebih ofensif jika diplomasi gagal. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran siap



TRUMP ANCAM BOM OMAN

Harga Minyak Naik, Yield Treasury AS Tertinggi 19 Tahun

Presiden AS Donald Trump berseru kepada para wartawan setelah turun dari pesawat Air Force One pada hari Minggu di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland. (AP)

mengambil tindakan militer untuk mematahkan blokade laut AS.

Hormuz Jadi Titik Rawan

Selat Hormuz menjadi pusat perhatian karena merupakan salah satu jalur energi terpenting dunia.

Sebelum perang berlangsung, sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global melewati jalur tersebut. Gangguan berkepanjangan di Hormuz berpotensi mengerek biaya energi dan transportasi di berbagai negara.

Iran menyatakan selat tersebut tidak akan dibuka sampai AS memenuhi tuntutan dalam kesepakatan sementara. Tuntutan itu antara lain pencabutan blokade terhadap pelabuhan Iran, penghapusan sanksi minyak, pelepasan aset Iran yang dibekukan, serta penghentian ancaman dan operasi militer.

Aktivitas pelayaran memang belum sepenuhnya berhenti. Sejumlah pengiriman minyak masih berlangsung dengan pola pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain. Namun, volume lalu lintas kapal telah turun tajam sehingga pasar tetap mencemaskan kemungkinan gangguan pasokan yang lebih besar.

Risiko tersebut tidak hanya berasal dari Hormuz. Di kawasan Laut Merah, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran juga kembali melaporkan serangan terhadap kapal-kapal yang mereka klaim terkait Arab Saudi.

Pasar Terguncang

Ketegangan geopolitik kemudian merembet ke pasar obligasi AS. Imbal hasil Treasury AS tenor 30 tahun mencapai sekitar 5,32 persen pada 18 Agustus. Reuters mencatat level tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2007, atau hampir dua dekade.

Sehari sebelumnya, yield 30 tahun

berada sekitar 5,31 persen. Sementara yield Treasury 10 tahun bergerak di sekitar 4,73 persen.

Kenaikan yield jangka panjang tidak semata-mata disebabkan perang. Investor juga mencermati posisi fiskal AS, kebutuhan penerbitan utang yang besar, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan perusahaan teknologi untuk investasi kecerdasan buatan.

Namun, konflik AS-Iran memperbesar kekhawatiran tersebut. Harga minyak yang berada di atas US\$90 per barel meningkatkan risiko inflasi. Kondisi itu dapat membuat bank sentral lebih sulit melonggarkan kebijakan moneter.

Dengan kata lain, pasar menghadapi situasi yang tidak sederhana: data ekonomi AS melemah, tetapi lonjakan harga energi berpotensi kembali mendorong inflasi.

Tekanan juga terlihat di pasar saham AS. Pada perdagangan Senin (17/8/2026), Dow Jones turun 0,51 persen. S&P 500 terkoreksi 0,52 persen, sedangkan Nasdaq melemah 0,31 persen.

Sektor energi menjadi satu-satunya kelompok utama di S&P 500 yang menguat. Sektor tersebut naik 0,87 persen seiring lonjakan harga minyak.

Sebaliknya, sektor komunikasi, barang konsumsi, dan keuangan mengalami tekanan. Saham teknologi juga bergerak volatil karena investor menghitung kembali valuasi perusahaan yang sangat bergantung pada investasi AI.

Micron Technology dan Applied Materials menjadi pengecualian dengan masing-masing menguat sekitar 4 persen dan 5,5 persen. Namun, penguatan saham chip tidak

cukup untuk mengangkat indeks utama.

Pasar juga menunggu laporan keuangan sejumlah peritel besar AS. Home Depot dijadwalkan merilis kinerja pada Selasa, sedangkan Walmart pada Kamis. Laporan tersebut menjadi penting karena investor ingin melihat apakah konsumsi rumah tangga AS masih mampu menopang perekonomian.

Data sebelumnya memberi sinyal yang kurang menggembirakan. Penjualan ritel AS pada Juli turun untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan.

Phil Blancato, kepala strategi investasi Osaic, menilai pasar cenderung menahan diri sambil menunggu data konsumsi dan laporan perusahaan.

"Concerns about recent softer data have the market being a bit tepid and waiting for retail earnings for direction," kata Blancato.

Di Asia, investor juga mendapat sinyal pelemahan ekonomi China.

Penjualan ritel China pada Juli hanya tumbuh 0,6 persen secara tahunan. Angka tersebut melambat dari pertumbuhan 1 persen pada Juni dan berada jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,5 persen.

Produksi industri juga tumbuh 4,5 persen secara tahunan. Angka tersebut melambat dari 5,3 persen pada Juni dan berada di bawah perkiraan 4,8 persen.

Investasi aset tetap China dalam tujuh bulan pertama 2026 bahkan turun 6,7 persen. Penurunan itu lebih dalam dibandingkan kontraksi 5,7 persen pada periode Januari-Juni.

Data tersebut memperlihatkan persoalan yang masih membebani ekonomi China: konsumsi domestik belum pulih kuat dan investasi masih lemah. (gus,rtr;ist/dya)

Cheese Platter Digandrungi, Intip Cara Membuatnya Sendiri

Cheese platter tengah digandrungi di Indonesia. Sajian berisi aneka keju, buah, crackers, selai, madu, hingga daging olahan itu kini tidak hanya ditemukan di restoran atau hotel.

Supermarket ikut menjualnya dalam kemasan siap santap dengan harga puluhan ribu rupiah.

Salah satunya Gelael Tebet Signature, Jakarta Selatan. Cheese platter di sana ditawarkan mulai Rp25.000. Ada pula pilihan Rp35.000 dengan tambahan irisan daging asap atau pastrami.

Grand Lucky juga menawarkan cheese platter dengan beberapa pilihan. Platter A dibanderol Rp32.900, Platter B Rp39.900, sedangkan Platter C Rp64.900.

Isinya dibuat menyerupai cheese board yang biasa ditemukan di restoran. Platter A, misalnya, berisi anggur muscat, tomat ceri, keju cheddar Anchor, Bega Mild, cheddar Lactima, crackers, dan madu Uray.

Platter B mendapatkan tambahan walnut dan selai stroberi. Sementara Platter C memiliki tambahan keju brie serta porsi buah yang lebih banyak.

Harga yang relatif terjangkau menjadi salah satu alasan sajian ini menarik perhatian. Konsumen tidak perlu membeli beberapa jenis keju, buah, crackers, dan pendamping secara terpisah untuk menikmati satu porsi cheese platter. Namun, tren ini bukan sekadar soal makanan murah yang viral.

Tradisi Kuliner Eropa

Cheese platter membawa tradisi kuliner Eropa yang telah berkembang selama berabad-abad. Kini tradisi tersebut dikemas ulang agar sesuai dengan gaya hidup konsumen Indonesia: praktis, mudah dibeli, menarik difoto, dan bisa dinikmati bersama.

Secara sederhana, cheese platter adalah sajian beberapa jenis keju yang ditata di atas papan atau nampan bersama makanan pendamping.

Pendampingnya bisa berupa crackers, roti, buah segar, kacang, madu, selai, acar, hingga daging olahan.

Tidak ada aturan tunggal mengenai komposisinya. Karena itu, cheese platter sangat fleksibel. Seseorang dapat menggunakan tiga jenis keju atau lebih, kemudian menyesuaikannya dengan buah dan pendamping yang tersedia. Konsep tersebut berbeda dengan sekadar menyajikan sepiring keju.

Pada cheese platter, penataan menjadi bagian penting dari pengalaman makan. Warna, tekstur, ukuran potongan, dan posisi setiap bahan diperhitungkan agar terlihat menarik sekaligus mudah disantap.

Cheese platter tidak memiliki satu titik kelahiran yang pasti. Konsepnya berkembang dari tradisi masyarakat Eropa menyajikan keju sebagai bagian dari jamuan makan.

Keju sendiri telah dikenal manusia selama ribuan tahun. Salah satu fungsi awal pengolahan susu menjadi keju adalah memperpanjang masa simpan susu. Dalam perkembangannya, keju menjadi bagian dari budaya kuliner di berbagai negara Eropa.

Prancis memiliki tradisi fromage yang kuat. Keju secara tradisional dapat disajikan sebagai cheese course, yakni setelah hidangan utama dan sebelum makanan penutup.

Dalam jamuan tertentu, beberapa jenis keju disajikan sekaligus. Keju kemudian dinikmati bersama roti dan makanan pendamping. Tradisi serupa juga berkembang di Inggris.

Metropolitan Museum of Art di New York menyimpan cheese stand dari London yang dibuat pada 1764. Peralatan tersebut digunakan untuk menempatkan satu roda keju dalam jamuan. Benda tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana penyajian keju telah memiliki tempat khusus dalam budaya makan Eropa sejak berabad-abad lalu.

Baru Ramai di Indonesia

Di Indonesia, cheese platter mendapatkan momentum ketika konsep makanan praktis bertemu dengan budaya media sosial. Sajian ini punya tampilan yang mudah menarik perhatian. Potongan keju berwarna kuning dan putih dapat dipadukan dengan stroberi merah, anggur hijau, crackers cokelat keemasan, walnut, dan madu. Hasilnya fotogenik.

Bagi konsumen, terutama yang gemar mencoba tren kuliner, cheese platter juga menawarkan pengalaman mencoba makanan yang biasanya dianggap premium dengan harga relatif terjangkau.

Format siap santap ini membuat cheese platter semakin dekat dengan kebiasaan konsumsi sehari-hari. Tidak harus menunggu pesta. Tidak harus datang ke restoran. Bisa dibeli saat berbelanja kebutuhan rumah tangga. Bisa dimakan sendiri. Bisa juga dibawa untuk kumpul bersama teman. (far,ist/dya)

Buat Sendiri Kreasimu

Keju (2-3 Jenis):

Kombinasikan karakter berbeda, seperti cheddar (gurih), gouda/colby (lembut), atau brie (creamy).

Buah:

Gunakan anggur, stroberi, atau apel untuk rasa segar dan warna. Pilih buah yang tidak terlalu berair.

Crackers:

Pilih crackers bernuansa netral atau irisan roti baguette tipis sebagai elemen renyah.

Unsur Manis:

Sediakan sedikit madu atau selai untuk menyeimbangkan gurihnya keju.

Kacang:

Tambahkan almond, walnut, atau mede untuk mempercantik tampilan dan tekstur.



Kacamata Pintar Meta Dilarang Masuk Pengadilan Inggris



Kacamata pintar Meta yang menggabungkan fungsi kamera, mikrofon, audio, dan kecerdasan buatan mulai menghadapi batasan di sejumlah ruang publik. Di Inggris dan Wales, perangkat tersebut kini dilarang masuk ke gedung pengadilan karena dianggap berpotensi digunakan untuk merekam secara diam-diam.

Kebijakan itu ditetapkan His Majesty's Courts & Tribunals Service (HMCTS), lembaga yang menangani sistem pengadilan pidana, perdata, dan keluarga di Inggris dan Wales. Juru bicara HMCTS mengatakan ada alasan jelas di balik larangan tersebut.

"Ada pembatasan yang jelas terkait pengambilan gambar atau video di dalam pengadilan dan tribunal, oleh karenanya penggunaan kacamata Meta dilarang." Aturan itu membuat kacamata pintar Meta diperlakukan berbeda dari smartphone. Pengunjung dan pengacara masih boleh membawa

ponsel ke gedung pengadilan, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk merekam persidangan. Sementara itu, kacamata pintar yang memiliki kemampuan merekam harus diserahkan kepada petugas keamanan sebelum pemilik memasuki gedung.

Kacamata akan disimpan sementara dan dikembalikan ketika pemilik meninggalkan gedung.

HMCTS juga tidak memiliki data mengenai berapa banyak kasus penggunaan atau penyitaan kacamata pintar yang telah terjadi di pengadilan Inggris dan Wales.

Larangan tersebut muncul ketika penggunaan kacamata pintar semakin meluas dan kemampuan perangkat berkembang dari sekadar mengambil foto menjadi perangkat komputasi yang terpasang di tubuh. Meta dilaporkan telah menjual lebih dari 7 juta pasang kacamata pintar pada 2025. Harga perangkat yang dipasarkan Meta berada pada kisaran

269 hingga 469 pound sterling, bergantung pada modelnya. Salah satu kasus yang memperkuat kekhawatiran terhadap kacamata pintar terjadi di Pengadilan Tinggi Inggris pada awal 2026.

Seorang penggugat bernama Laimonas Jakštys mengenakan kacamata pintar ketika memberikan kesaksian dalam perkara yang berkaitan dengan jabatan direktur sebuah perusahaan properti.

Hakim Raquel Agnello KC kemudian mencurigai adanya sesuatu yang tidak biasa. Jakštys beberapa kali berhenti cukup lama sebelum menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan silang. Pengacara yang hadir dan penerjemah juga mendengar gangguan suara dari sekitar kacamata yang dikenakannya.

Jakštys kemudian diminta melepas perangkat tersebut. Dalam putusan tertulis, pengadilan mencatat bahwa setelah kacamata dilepas, telepon seluler Jakštys sempat mengeluarkan suara seseorang yang sedang berbicara dengannya. Kacamata pintar dan telepon selulernya kemudian diserahkan kepada pengacaranya.

Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa Jakštys mendapatkan arahan ketika memberikan kesaksian. Ia membantah menggunakan kacamata untuk menerima jawaban dan membantah perangkat tersebut terhubung dengan telepon pintarnya.

Namun, pengadilan menilai kesaksiannya tidak dapat dipercaya dan menolaknya.

Kasus tersebut memperlihatkan persoalan baru yang muncul akibat

teknologi wearable. Sebelumnya, pengadilan dapat membatasi penggunaan telepon, komputer, atau alat perekam dengan lebih mudah. Kacamata pintar membuat persoalannya berbeda karena kamera dan mikrofon terintegrasi langsung ke benda yang secara fisik terlihat seperti kacamata biasa.

New York Lebih Dulu Melarang

Inggris dan Wales bukan satu-satunya wilayah yang mengambil langkah tersebut. Sistem pengadilan New York telah menerapkan kebijakan yang lebih luas. Mulai 20 Juli 2026, kacamata pintar dilarang di seluruh fasilitas Unified Court System New York.

Aturan itu berlaku di lebih dari 1.240 pengadilan di negara bagian tersebut. Larangannya juga tidak hanya menasar Meta Ray-Ban.

Semua perangkat yang dikenakan di kepala atau wajah dan memiliki kamera, mikrofon, komputer, atau teknologi yang memungkinkan perekaman audio maupun video termasuk dalam aturan tersebut. Bahkan kacamata pintar dengan lensa resep tetap masuk kategori yang dilarang (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tips Berpakaian agar Tubuh Terlihat Langsing Tanpa Harus Diet

Ingin tampilan terlihat lebih jenjang dan proporsional tanpa harus mengubah bentuk tubuh? Kuncinya tidak selalu pada warna hitam atau pakaian ketat. Pemilihan potongan, ukuran, garis, warna, hingga aksesoris bisa menciptakan ilusi visual yang membuat siluet tubuh tampak lebih panjang dan seimbang.

Salah satu hal penting adalah memahami proporsi tubuh sebelum memilih pakaian. Fashion stylist Rachel Matthews Burton juga menekankan bahwa tidak ada satu formula berpakaian yang cocok untuk semua orang.

Menurut Burton, memahami bentuk tubuh lebih penting daripada sekadar mengikuti tren. Dengan mengenali proporsi tubuh, seseorang bisa memilih busana yang menonjolkan bagian yang disukai sekaligus mengalihkan perhatian dari area yang ingin disamarkan.

Kenali bentuk tubuh

Jangan langsung membeli pakaian hanya karena sedang tren. Kenali lebih dulu proporsi tubuh, apakah cenderung petite, apple-shaped, pear-shaped, atletis, atau memiliki bentuk lainnya.

Burton menyarankan melihat orang dengan bentuk tubuh yang mirip sebagai referensi. Perhatikan bagaimana mereka memilih potongan, panjang pakaian, serta bagian tubuh yang ditonjolkan.

Prinsipnya bukan mengikuti aturan kaku. Burton justru menyarankan bereksperimen untuk menemukan kombinasi yang paling sesuai. "It's about trial and error," kata Burton ketika membahas cara menemukan gaya yang tepat.

Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan fashion 2026 yang semakin meninggalkan aturan lama tentang pakaian yang dianggap "paling flattering".

Media fashion internasional mencatat adanya pergeseran menuju gaya yang lebih bebas, personal, nyaman, dan ekspresif. Istilah "flattering" bahkan mulai dipertanyakan karena terlalu sering dikaitkan dengan keharusan membuat tubuh terlihat lebih kecil.

Ciptakan garis vertikal

Salah satu trik paling sederhana adalah membuat mata mengikuti garis dari atas ke bawah. Celana atau rok bergaris vertikal, blazer panjang, outer yang jatuh lurus, hingga pakaian dengan detail memanjang dapat memberikan kesan tubuh lebih tinggi.

Harper's Bazaar juga mencatat bahwa garis vertikal dapat menciptakan ilusi tubuh yang lebih tinggi dan ramping. Sementara itu, pendekatan monokrom membuat batas antarbagian pakaian menjadi lebih samar sehingga siluet terlihat lebih menyatu.

Jangan terlalu ketat atau terlalu longgar

Ukuran pakaian sangat menentukan tampilan akhir. Pakaian yang terlalu ketat bisa menonjolkan bagian tubuh tertentu. Sebaliknya, pakaian yang terlalu besar dapat membuat siluet terlihat tenggelam dan

menambah kesan volume. Burton mengingatkan bahwa pakaian yang sedikit lebih longgar dari bentuk tubuh justru bisa memberikan efek lebih ramping dibanding busana yang terlalu melekat.

Namun, longgar bukan berarti kebesaran. Pilih pakaian yang tetap mengikuti garis tubuh secara natural.

Prinsip ini juga berlaku untuk blazer. Potongan yang mengikuti pinggang cenderung memberi struktur lebih jelas dibanding blazer boxy yang terlalu lebar.

Tonjolkan bagian yang paling disukai

Tidak semua perhatian harus diarahkan untuk menyamarkan bagian tubuh. Justru, salah satu strategi styling adalah mengarahkan mata ke bagian yang paling ingin ditonjolkan. Bisa melalui garis leher, panjang lengan, detail di pinggang, belahan rok, atau aksesoris.

Burton menyarankan penggunaan detail pada bagian tubuh yang memiliki garis lebih kecil, misalnya ujung pergelangan tangan. Ia juga mengingatkan agar tidak berlebihan menumpuk material. "Bulk adds bulk," ujar Burton.

Perhatikan proporsi celana

Tidak ada satu model celana yang otomatis cocok untuk semua bentuk tubuh. Celana skinny, cropped, cigarette, maupun wide-leg bisa memberikan efek berbeda tergantung

proporsi tubuh dan pakaian yang dikenakan sebagai atasan. Burton memberikan contoh kombinasi celana skinny dengan atasan boxy. Pada tubuh berbentuk apple, kombinasi tersebut justru dapat membuat bagian tubuh yang lebih lebar semakin terlihat.

Karena itu, jangan hanya melihat model celana. Perhatikan hubungan antara bawahan, atasan, dan panjang khaki. Celana high-waist juga bisa menjadi pilihan. Potongan pinggang tinggi menciptakan ilusi garis pinggang yang lebih tinggi sehingga kaki terlihat lebih panjang.

Berani memakai motif dan warna

Anggapan bahwa pakaian hitam adalah satu-satunya pilihan untuk terlihat ramping sudah terlalu lama beredar. Burton justru menyarankan penggunaan motif secara strategis. Motif dapat menarik perhatian sekaligus membantu mengalihkan fokus dari bagian tubuh tertentu. Kuncinya adalah skala motif.

Motif yang terlalu besar pada tubuh petite, misalnya, dapat terlihat tidak proporsional. Sebaliknya, motif dengan ukuran yang sesuai bisa menjadi elemen visual yang memperkuat penampilan.

Warna juga tidak harus selalu gelap. Burton menilai aksesoris berwarna tegas bisa digunakan untuk mengarahkan perhatian ke bagian tertentu. (farist/dya)



Indonesia 2027: Rogoh ...dari Hal 1

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, dikutip Selasa (18/8/2026), pemerintah mengalokasikan Rp589,68 triliun untuk membayar bunga utang dalam negeri. Sementara bunga utang luar negeri mencapai Rp60,63 triliun.

Pembayaran tersebut mencakup bunga Surat Berharga Negara (SBN), bunga pinjaman, dan biaya pengelolaan utang.

Kenaikan bunga utang bukan fenomena baru. Realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp386,34 triliun pada 2022. Setahun kemudian naik menjadi Rp439,88 triliun. Pada 2024 angkanya kembali meningkat menjadi Rp488,43 triliun dan mencapai Rp514,4 triliun pada 2025.

Artinya, jika dibandingkan dengan realisasi 2022, kebutuhan anggaran untuk bunga utang pada RAPBN 2027 meningkat sekitar Rp264 triliun.

Kenaikan bunga utang terjadi ketika pemerintah masih membutuhkan pembiayaan baru.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit Rp671,16 triliun atau 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih rendah dibandingkan outlook defisit 2026 sebesar Rp734,32 triliun atau 2,85 persen PDB.

Namun, penurunan defisit tidak berarti kebutuhan utang berhenti. Pemerintah merancang pembiayaan utang sebesar Rp876,27 triliun pada 2027. Dari jumlah tersebut, Rp779,94 triliun berasal dari penerbitan SBN neto dan Rp96,33 triliun dari pinjaman neto.

Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelaskan pengelolaan utang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko. Pemerintah akan mengutamakan pembiayaan domestik, memperluas basis investor, melakukan diversifikasi instrumen, serta mengoptimalkan liability management.

Pemerintah juga menegaskan pembiayaan utang harus menopang program nasional tanpa menciptakan beban berlebihan atau mempersempit ruang fiskal.

Beban bunga utang menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja lain.

Dalam RAPBN 2027, total belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun, sementara transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi Rp387,89 triliun. Dari jumlah itu, subsidi energi mencapai Rp272,95 triliun.

Jika bunga utang dan subsidi digabungkan, kebutuhan anggarannya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Besarnya dua pos tersebut

menunjukkan bagaimana APBN harus membagi ruang belanja untuk membayar kewajiban utang sekaligus membiayai kebutuhan masyarakat dan program pemerintah.

Kementerian Keuangan menyebut pembayaran bunga utang merupakan kewajiban hukum yang harus dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah. Pembayaran tersebut diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meski kebutuhan bunga meningkat, pemerintah menilai kondisi fiskal Indonesia masih terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan juga mencatat Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Dalam penilaian S&P yang dikutip pemerintah, prospek pertumbuhan Indonesia dinilai kuat. Kebijakan makroekonomi juga dinilai prudent, sementara beban utang pemerintah relatif ringan dibandingkan negara-negara dengan peringkat yang sebanding.

Purbaya menilai rasio utang Indonesia masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB yang ditetapkan undang-undang.

"Jadi, kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60%. Kita masih 40% jadi masih jauh," kata Purbaya.

Ia meminta posisi utang tidak dilihat hanya dari nominalnya. "Kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ujarnya.

BI: ULN Pemerintah US\$217,3 Miliar

Data Bank Indonesia menunjukkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pada Mei 2026 mencapai US\$217,3 miliar. Angka tersebut tumbuh 3,7 persen secara tahunan.

BI menyebut pertumbuhan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara internasional. Aliran tersebut, menurut BI, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan

Denny Prakoso dalam keterangan resmi BI dilihat Selasa (18/8/2026).

Ramdan mengatakan pemerintah juga terus mengelola ULN secara "pruden, terukur, dan fleksibel" untuk memperoleh pembiayaan yang efisien dan optimal.

BI mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat risiko pengelolaan ULN tetap terkendali.

Pada triwulan I 2026, posisi ULN pemerintah tercatat US\$214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan. BI ketika itu juga menyatakan struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang.

Di tengah kenaikan bunga utang, pemerintah menargetkan keseimbangan primer RAPBN 2027 mendekati kondisi berimbang.

Keseimbangan primer diproyeksi negatif Rp20,85 triliun. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan outlook 2026 yang negatif Rp152,08 triliun.

Keseimbangan primer menggambarkan kemampuan penerimaan negara membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang. Semakin kecil defisitnya, semakin dekat APBN menuju kondisi ketika penerimaan mampu menutup belanja sebelum pembayaran bunga.

Kinerja APBN 2026 sejauh ini bahkan menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen.

Defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB. "Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun," kata Purbaya saat memaparkan kinerja APBN Semester I 2026.

Data tersebut menunjukkan kondisi aktual APBN pada semester I 2026 berbeda dengan proyeksi RAPBN 2027. Jika semester I 2026 masih mencatat surplus keseimbangan primer, pemerintah justru memproyeksikan indikator tersebut kembali negatif pada 2027.

Risiko Rupiah dan Suku Bunga

Masalahnya bukan hanya seberapa besar utang pemerintah, tetapi juga berapa biaya yang harus dibayar untuk memperoleh pembiayaan tersebut.

Nota Keuangan RAPBN 2027 mencatat perubahan suku bunga global sebagai salah satu risiko pengelolaan utang. Kenaikan suku

3 NEGARA PEMBERI UTANG RI TERBESAR



Singapura

US\$51,07 miliar



Amerika Serikat

US\$29,53 miliar



China

US\$25,69 miliar

bunga dapat meningkatkan cost of fund ketika pemerintah menerbitkan utang baru.

Pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan beban pembayaran utang dalam valuta asing.

Karena itu, pemerintah menggunakan strategi pengelolaan utang untuk menjaga keseimbangan biaya dan risiko. Pembiayaan domestik menjadi salah satu pilihan utama, sementara basis investor dan instrumen utang terus diperluas.

Risiko tersebut menjadi semakin penting ketika kebutuhan pembiayaan baru berjalan bersamaan dengan meningkatnya pembayaran bunga. Pemerintah memiliki sejumlah indikator untuk menunjukkan bahwa utang Indonesia masih dalam batas terkendali. Rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen. Defisit RAPBN 2027 juga ditargetkan 2,40 persen PDB.

Namun, kenaikan pembayaran bunga tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Dari Rp386,34 triliun pada 2022, realisasi pembayaran bunga utang meningkat menjadi Rp514,4 triliun pada 2025. Pemerintah kemudian memperkirakan kebutuhan tersebut mencapai Rp582,24 triliun pada 2026 dan menyiapkan Rp650,31 triliun pada 2027.

Pada saat yang sama, pemerintah masih membutuhkan Rp876,27 triliun pembiayaan utang baru. (wid,ktn,kcm,ist/dya)

UTANG DARI ORGANISASI INTERNASIONAL



IBRD/World Bank

US\$21,32 miliar



Asian Development Bank

US\$12,23 miliar



IMF

US\$8,72 miliar



APBD Surabaya 2027 Diproyeksikan Rp15 Triliun

KETUA DPRD: ANGGARAN HARUS BERDAMPAK KE EKONOMI RAKYAT

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Surabaya menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD pada Jumat (14/8/2026).

Besaran APBD Surabaya tahun 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp15 triliun, meski angka final masih menunggu kepastian transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, pembahasan KUA-PPAS dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Yang menjadi prioritas utama adalah kepentingan masyarakat, termasuk memaksimalkan APBD untuk pro-rakyat,” kata Syaifuddin usai rapat paripurna.

Menurutnya, anggaran 2027 harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu perhatian DPRD adalah memastikan warga yang masuk kategori miskin dan pramiskin tetap memperoleh dukungan pemerintah.

Syaifuddin mencontohkan kebutuhan rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan, serta program Pemuda Tangguh sebagai sejumlah sektor yang perlu tetap mendapat perhatian.

Ia juga menyoroti masa transisi penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima program sosial.

Menurutnya, Pemkot masih perlu menggunakan data dan regulasi yang berlaku di tingkat daerah selama mekanisme desil belum sepenuhnya jelas dan respons terhadap sanggahan masyarakat belum berjalan optimal.

“Kalau ketentuan desil sudah clear, baru kita berhenti di kaitan itu. Saat ini masih transisi,” ujarnya.

APBD Harus Berdampak pada Ekonomi Warga

Syaifuddin menegaskan, kenaikan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka anggaran. Peningkatan tersebut harus menghasilkan efek ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat.

“Kesuksesan kenaikan APBD manakala itu berdampak pada ekonomi rakyat. Kalau tidak



berdampak, sama dengan peningkatan ekonomi yang tidak ada efeknya bagi masyarakat,” tuturnya.

Untuk itu, DPRD mendorong agar kebijakan anggaran 2027 semakin memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Syaifuddin, UMKM merupakan salah satu fondasi ekonomi kota yang relatif mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK). Syaifuddin menilai pengelolaan SWK tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki fasilitas fisiknya.

“SWK harus multifungsi. Tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga bisa menjadi ruang bagi anak-anak seniman untuk tampil dan mengais ekonomi,” katanya.

Ia mendorong konsep SWK yang lebih tematik dan adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen, khususnya generasi muda. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pendataan pelaku UMKM secara lebih baik dan mengatur rotasi atau konsep usaha agar setiap SWK memiliki daya tarik berbeda.

“Orang datang ke SWK bukan hanya karena lapar, tetapi juga untuk menikmati suasana yang ada di situ. Jadi harus mampu menjawab situasi yang ada, jangan kaku,” ujarnya.

Selain SWK, DPRD juga menyoroti keberadaan Rumah Padat Karya. Syaifuddin meminta Pemkot tidak memaksakan jenis usaha kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan minat, bakat, dan potensi ekonomi di sekitar lokasi.

Menurutnya, Rumah Padat Karya seharusnya menjadi fasilitator yang mendorong masyarakat untuk

berusaha secara kompetitif. Potensi anak muda, termasuk generasi Z, juga dinilai dapat dilibatkan sebagai bagian dari pemasaran produk UMKM Surabaya.

Hal senada diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi I. “Sekitar Rp15 triliun itu kita sambil menunggu TKD yang turun. Kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan lewat Pak Mendagri, TKD akan dikembalikan,” kata Eri.

Ia menjelaskan, Surabaya sebelumnya mengalami pemangkasan TKD sekitar Rp1,2 triliun. Karena itu, Pemkot masih menghitung kembali kemampuan fiskal daerah dengan mempertimbangkan kebijakan transfer pemerintah pusat.

Pemkot Prioritaskan 3 Sektor

Di tengah proyeksi tersebut, Eri mengatakan Pemkot akan menetapkan sejumlah program sebagai prioritas utama pada 2027. Tiga sektor yang menjadi perhatian adalah pengaspalan jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan penanganan genangan.

Untuk penanganan genangan, Pemkot menyiapkan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Eri mengatakan anggaran tersebut akan diarahkan pada titik-titik yang telah dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan. “Prioritas kita ada di genangan,” ujarnya.

Eri menyebut terdapat sekitar 200 titik yang diperkirakan menjadi sasaran penanganan pada 2027. Secara keseluruhan, titik genangan di Surabaya disebut telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dari sekitar 700 titik menjadi sekitar 400-an titik.

Sejumlah kawasan yang masuk perhatian antara lain Simo Kalangan,

Tanjungsari, Margorejo, Jemursari hingga kawasan AWS.

Selain genangan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan juga tetap masuk dalam rencana. Eri memastikan proyek Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) tetap dilanjutkan.

“Untuk JLLB, anggaran yang disiapkan berada di kisaran Rp500 miliar, dengan menggabungkan sejumlah pekerjaan yang telah berjalan,” ucapnya.

Dengan proyeksi APBD sekitar Rp15 triliun tersebut, Pemkot dan DPRD Surabaya diharapkan tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, infrastruktur, pengurangan genangan, serta penguatan ekonomi masyarakat. (adv,ama/dya)



Yang menjadi prioritas utama adalah kepentingan masyarakat, termasuk memaksimalkan APBD untuk pro-rakyat.”

SYAIFUDDIN ZUHRI
Ketua DPRD Kota Surabaya

